

PELUANG DAN TANTANGAN PEMUDA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH: STUDI KASUS DIKABUPATEN GOWA TAHUN 2015

*Opportunities and Challenges of Youth in the Local Election:
Case Study in Gowa Regency of Year 2015*

Ahmad Harianto Silaban

Metadata

Peneliti Sosial dan Politik

Email: silabanhening@gmail.com

ABSTRACT

Every citizen, including youth, has the right and opportunity to become a Head of Region . In the history of the struggle of the Indonesia's nation, youth pioneering always appears as a determining force. They are a group of intellectuals who have high ideals, a spirit of selfless devotion, and willing to sacrifice for the benefit of the nation. Along with the development of the era, the role of youth in the nation's development process began to experience a shift. The reform era has provided a more open space for youth to take on bigger roles. It is seen from existing regulations, related to General Election or Local Elections as the example. This research aims to find out the opportunities and challenges posed by youth in Local Elections (Pilkada) and the factors that influence the existence of youth in the elections. The method used in this research is qualitative. Data were collected through interviews and documentation. The study was conducted in Gowa regency, an area that has young prospective head of region which is the result of concurrent local elections in 2015. Data analysis involves several components, namely data reduction, data presentation, and conclusions. The results show that youth have opportunities and challenges to become head of the region and youth can perform his capacity and capability in elections. The opportunity for youth in local elections in Gowa regency is very big because all stakeholders give space even support youth who progress as candidates for head of region. The challenge faced by youth in elections is the issue of age and experience that is still perceived as inadequate by a small number of communities and elite groups. The existence of youth in Pilkada is influenced by two things, namely the provision of space by all stakeholders and the willingness of the youth itself.

Keywords: Opportunities, Challenges, Youth, Existence, Local Elections

ABSTRAK

Setiap warga negara, termasuk pemuda, memiliki hak dan peluang untuk menjadi kepala daerah. Dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, kepeloporan pemuda selalu tampil sebagai kekuatan penentu. Mereka adalah kelompok intelektual yang memiliki idealisme tinggi, semangat pengabdian tanpa pamrih, dan rela berkorban demi kepentingan bangsa. Seiring perkembangan zaman, peran pemuda dalam proses pembangunan bangsa mulai mengalami pergeseran. Era reformasi telah memberi ruang yang lebih terbuka bagi pemuda untuk mengambil peran yang lebih besar. Hal tersebut

dilihat dari regulasi yang ada, terkait pemilihan umum (Pemilu) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada) misalnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui peluang dan tantangan yang dimiliki oleh pemuda dalam Pilkada dan faktor yang mempengaruhi eksistensi pemuda dalam Pilkada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gowa, daerah yang memiliki calon kepala daerah yang muda yang merupakan hasil Pilkada Serentak Tahun 2015 lalu. Analisis data melibatkan beberapa komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemuda memiliki peluang dan tantangan untuk menjadi kepala daerah dan pemuda bisa tampil dalam Pilkada. Peluang pemuda dalam Pilkada Gowa sangat besar karena semua *stakeholder* memberi ruang bahkan mendukung pemuda yang maju sebagai calon kepala daerah. Tantangan yang dihadapi pemuda dalam Pilkada adalah persoalan umur dan pengalaman yang masih dipersepsi kurang memadai oleh sebagian kecil masyarakat dan kelompok elite. Eksistensi pemuda dalam Pilkada dipengaruhi oleh dua hal, yaitu pemberian ruang oleh semua *stakeholder* yang ada serta kemauan dan kesiapan pemuda itu sendiri.

Kata Kunci: Peluang, Tantangan, Pemuda, Eksistensi, Pemilihan Kepala Daerah

PENDAHULUAN

Dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, kepeloporan pemuda selalu tampil sebagai kekuatan penentu. Mereka adalah kelompok intelektual yang memiliki idealisme tinggi, semangat pengabdian tanpa pamrih, dan rela berkorban demi kepentingan bangsa. Kajian-kajian historis pemuda di Indonesia cenderung melihat pemuda sebagai elite sosial dengan dunia pergerakannya serta peranannya. Dahulu pemuda berpolitik pada ranah ekstra parlemen sebagai agen yang membebaskan Indonesia dari penjajahan asing, dan juga dari kezaliman penguasa Indonesia sendiri. Tercatat dari beberapa sejarah pergerakan pemuda di Indonesia, yang dimulai dari Boedi Oetomo (20 Mei 1908), yang kemudian diperingati sebagai hari kebangkitan Nasional. Berikutnya adalah Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928), Proklamasi kemerdekaan (17 Agustus 1945), transisi politik pada tahun 1966, serta yang paling fenomenal adalah gerakan reformasi 1998 yang menjadi pelopor atas lahirnya era reformasi.

Beberapa kajian terdahulu mengatakan bahwa revolusi Indonesia digerakkan oleh para pemuda dengan melukiskan peranan yang revolusioner dari pemuda Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yang secara tiba-tiba bergerak menjadi militan (Anderson, 1988:21). Menurut Anderson, sejarah Indonesia pada kurun waktu 1944-1946 sebagai fase yang penting, karena telah terjadi proses transformasi dan dislokasi sosial, serta munculnya pemuda sebagai kekuatan pembaharu yang revolusioner. Salah

satu karakter pemuda Indonesia yang digambarkan oleh Anderson bahwa pemuda di Indonesia tidak merujuk pada jenjang usia tertentu. Namun apa yang dikatakan oleh Anderson tentu berbeda dengan apa yang termaktub dalam Undang-undang kepemudaan Republik Indonesia, yang memberikan batasan usia pemuda, yakni hanya yang berumur antara 16-30 tahun. Batasan usia tersebut tertuang pada Bab I (Ketentuan Umum), Pasal 1 angka 1 “Pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun”.

Melihat usia para pemuda yang tergabung dalam Boedi Utomo dan Sumpah Pemuda, memang cukup menarik untuk dikaji lebih jauh apabila dibandingkan dengan konteks hari ini. Hampir semua pelopor Sumpah Pemuda berusia dibawah 30 tahun. Mulai dari Soegondo Djojopoespito sebagai pemimpin kongres pemuda II (23 tahun), Johannes Leimena yang mengetuai organisasi Jong Ambon (23 tahun), M. Yamin dari Sumatera Barat yang yang menyusun rumusan kongres sumpah pemuda (23 tahun), Amir Syarifuddin Harahap sebagai wakil dari Jong Batak Bond (21 tahun), W.R. Supratman yang menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya (25 tahun), Kartosoewirjo yang belakangan menjadi pemimpin DI/TII (23 tahun), Adnan Kapau Gani sebagai wakil Jong Sumatra Bond (23 tahun), Djoko Marsaid sebagai wakil dari Jong Java sekaligus wakil ketua kongres saat itu, S. Mangoesarkoro yang aktif di dunia pendidikan dan menjadi Menteri Pendidikan pada tahun 1949-1950 (24 tahun), dan Sie Kong Liong yang merupakan pemilik gedung tempat berlangsungnya kongres pemuda II yang kini dijadikan museum pemuda. Sedikit berbeda dengan tokoh pendiri Boedi Utomo yang merupakan perpaduan antara usia muda dan usia tua. Dr. Soetomo (20 tahun), Goenawan Mangoenkoesoemoe, Soeraji, Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan penggagas awal (56 tahun).

Studi tentang kepemudaan sebelumnya banyak mengangkat pemuda sebagai kolektifitas yang melawan sistem politik. Namun kajian saat ini sudah mulai berubah, dimana pemuda sudah masuk sebagai anggota partai, ikut serta dalam memperebutkan kursi legislatif, bahkan bertarung untuk mendapat kursi kepala daerah. Pemuda sebagai agen perubahan harus dapat mengawal proses pelaksanaan demokrasi kearah yang lebih substantif, yakni terlaksananya pilkada secara *free* dan *fair*. Untuk mengawal proses pilkada tersebut, pemuda dapat mengambil peran, baik sebagai penyelenggara,

pengawas, maupun peserta. Pemuda harus mampu tampil sebagai agen penjaga moral dan etika politik dalam proses demokrasi, artinya pilkada langsung harus berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sikap dan perilaku politik yang dijalankan oleh pemuda harus menjunjung tinggi etika dan sopan-santun politik, sehingga tidak terbawa arus “politik praktik kotor” dan menghalalkan segala cara.

Pemuda sudah tidak memiliki hambatan secara regulasi untuk ikut aktif dalam politik praktis. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang sebelumnya mencantumkan syarat kepala daerah minimal usia 30 tahun, telah direvisi pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Bahkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 7 huruf e, dicantumkan syarat calon kepala daerah sebagai berikut: “Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”

Dengan adanya regulasi yang sifatnya mendorong para pemuda, maka diharapkan akan banyak pemuda yang memiliki kapasitas dan integritas menjadi kepala daerah. Namun hingga saat ini, pemuda yang menjadi kepala daerah masih sangat minim. Yopi Arianto di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau (30 tahun), Mardani H. Maming di Kabupaten Batulicin Provinsi Kalimantan Selatan (29 tahun), Makmun Ibnu Fuad di Kabupaten Bangkalan Madura (27 tahun). Kemudian ditambah tiga lagi dari hasil pilkada serentak 9 desember 2015 lalu, yakni Sutan Riska Tuanku Kerajaan di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat (26 tahun), Adnan Purichta IYL di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan (30 tahun), dan Mochamad Nur Arifin atau Gus Ipin sebagai Wakil Bupati Trenggalek (25 tahun).

Masih ada beberapa kepala daerah lain yang tergolong muda, seperti Emil Elistianto Dardak di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, Sunarna di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Bahkan ada juga dua gubernur, yakni Muhammad Ridho Ficardo di Provinsi Lampung, dan Zumi Zola di Provinsi Jambi. Namun usia mereka sudah diatas 30 tahun, yang artinya bukan lagi kategori pemuda jika mengacu pada undang-undang kepemudaan.

Sebenarnya sudah cukup banyak pemuda yang maju sebagai calon kepala daerah, baik itu bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, maupun gubernur/wakil gubernur. Namun sangat sedikit diantaranya yang berhasil terpilih dan menjabat. Di

Sulawesi Selatan misalnya, ada Andi Seto Gadhista Asapa di Kabupaten Sinjai dan Andi Irsan Idris Galigo pada tahun 2013. Meskipun keduanya sudah melebihi usia 30 tahun, tapi masih bisa juga dikategorikan pemuda, karena belum mencapai usia 40 tahun. Namun kedua calon tersebut tidak terpilih, padahal keduanya merupakan putra mahkota bupati yang sedang menjabat saat itu.

Pada tahun 2010 lalu, memang ada yang berhasil menjadi wakil bupati, yakni Indah Putri Indriani di Kabupaten Luwu Utara. Meskipun usianya sudah 33 tahun pada saat itu, tetap masih layak diberikan apresiasi, apalagi dia adalah wakil bupati perempuan pertama di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2015, ada beberapa calon yang masuk kategori pemuda. Ada dua calon yang sudah lebih dari usia 30 tahun, yakni Andi Zulkarnaen Soetomo di Kabupaten Soppeng (calon wakil bupati) dan Indah Putri Indriani di Kabupaten Luwu Utara (calon bupati). Namun hanya Indah Putri Indriani yang terpilih, dan menjadi bupati perempuan pertama di Sulawesi Selatan. Untuk kategori usia dibawah 30 tahun juga ada dua, yakni Adnan Purichta IYL sebagai calon bupati dan Wahyu Permana Kaharuddin sebagai calon wakil bupati (sama-sama di Kabupaten Gowa). Adnan Purichta IYL dan Wahyu Permana Kaharuddin sama-sama juga baru berusia 29 tahun pada saat pencalonan.

Khusus untuk Adnan Purichta IYL, memang darah politik sudah mengalir didalam jiwa raganya. Sebelum menjadi calon Bupati Gowa, Adnan Purichta IYL sudah dua kali menjadi legislator di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2009, Adnan Purichta IYL menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Partai Demokrat. Pada tahun 2014, Adnan Purichta IYL kembali menjadi anggota DPRD Sulsel melalui Partai Golkar. Pengalaman menjadi legislator tentu menjadi peluang yang baik bagi Adnan Purichta IYL untuk maju sebagai calon bupati. Namun tantangan yang dihadapi juga tidak mudah. Regulasi sempat mengatur pelarangan terhadap calon yang merupakan garis dinasti politik. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah secara tegas mencantumkan dalam Pasal 7 huruf (q), yakni salah satu syarat calon kepala daerah adalah “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”. Penjelasan dari pasal tersebut ialah “Calon Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota tidak mempunyai ikatan perkawinan atau hubungan darah/garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, dan juga dengan Gubernur atau Wakil Gubernur pada provinsi yang sama”. Regulasi tersebut akhirnya menghilangkan peluang

Adnan Purichta IYL untuk menjadi kepala daerah. Regulasi tersebut mendapat penolakan dari berbagai pihak, khususnya beberapa bakal calon kepala daerah yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana, termasuk Adnan Purichta IYL. Beberapa diantaranya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya tuntutan mereka pun dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka pasal tersebut dihilangkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang pemilihan Kepala daerah. Dengan demikian, Adnan Purichta IYL kembali memiliki peluang untuk menjadi kepala daerah.

Melihat konteks regulasi, undang-undang yang ada sudah memberikan ruang yang cukup luas kepada pemuda untuk ikut dalam politik praktis, dalam hal ini Pilkada. Akan tetapi jumlah pemuda yang maju sebagai calon dalam Pilkada masih sedikit. Belum lagi jika dilihat pemuda yang berhasil menang dalam Pilkada, jumlahnya semakin sedikit. Melihat kesenjangan tersebut (antara terbukanya ruang dan sedikitnya pemuda yang maju sebagai calon kepala daerah, serta minimnya calon yang berhasil menjadi kepala daerah), maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan memahami bagaimana sebenarnya peluang dan tantangan pemuda dalam Pilkada, serta bagaimana eksistensi pemuda dalam Pilkada.

METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah studi kasus melalui orientasi fenomenologi, dengan jenis penelitian kualitatif. Orientasi fenomenologi bertujuan untuk menghasilkan temuan atau kebenaran intersubjektif dalam penelitian kualitatif, yakni kebenaran yang dibangun dari jalinan berbagai faktor yang bekerja bersama-sama, seperti budaya dan sifat unik manusia (Irawan, 2006). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait peluang dan tantangan yang dimiliki oleh pemuda dalam Pilkada, serta faktor yang mempengaruhi eksistensi pemuda dalam Pilkada.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Gowa dengan unit analisis salah satu calon bupati pada pilkada 2015 lalu, yakni Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo. Kabupaten Gowa dipilih karena satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang

memiliki calon kepala daerah pemuda yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun data yang dimaksud yakni data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara terhadap informan kunci dan informan pendukung. Sedangkan, data sekunder atau data pendukung digunakan untuk menunjang perumusan pencapaian tujuan penelitian berupa dokumen tertulis ataupun laporan tertulis pustaka lainnya. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini daftar kepala daerah muda, daftar anggota DPRD muda, hasil survei Pilkada Gowa, rekapitulasi hasil Pilkada Gowa 2015 lalu, dan jumlah penduduk usia muda di Kabupaten Gowa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Esterbeg mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterbeg juga mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur (Sugiyono, 2010). Metode wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, dimana peneliti telah mengetahui tentang informasi apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

Pengumpulan data juga peneliti lakukan melalui metode dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang dijadikan sebagai sumber referensi diantaranya daftar kepala daerah muda, daftar anggota DPRD muda, hasil survei Pilkada Gowa, rekapitulasi hasil Pilkada Gowa 2015 lalu, dan jumlah penduduk usia muda di Kabupaten Gowa.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang dan melibatkan beberapa komponen yaitu, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peluang Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo dalam Pilkada Gowa 2015

Peluang Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo dalam Pilkada Gowa 2015 lalu sangat besar. Semua elemen kekuatan politik yang ada memberikan dukungan, mulai dari organisasi kepemudaan (dalam hal ini KNPI), partai politik, masyarakat adat, dan masyarakat secara umum yang tergambar dari hasil survei.

Tantangan Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo dalam Pilkada Gowa 2015

Tantangan yang dihadapi oleh Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo tetap ada, yakni masalah usia muda. Berdasarkan analisis kekuatan politik, tantangan tersebut datang dari aktor politik, dalam hal ini lawan politik atau kandidat lain, dan juga sebagian kecil masyarakat. Eksistensi pemuda dalam Pilkada dipengaruhi oleh dua hal, yaitu pemberian ruang oleh elite politik, serta kemauan dan kesiapan pemuda itu sendiri.

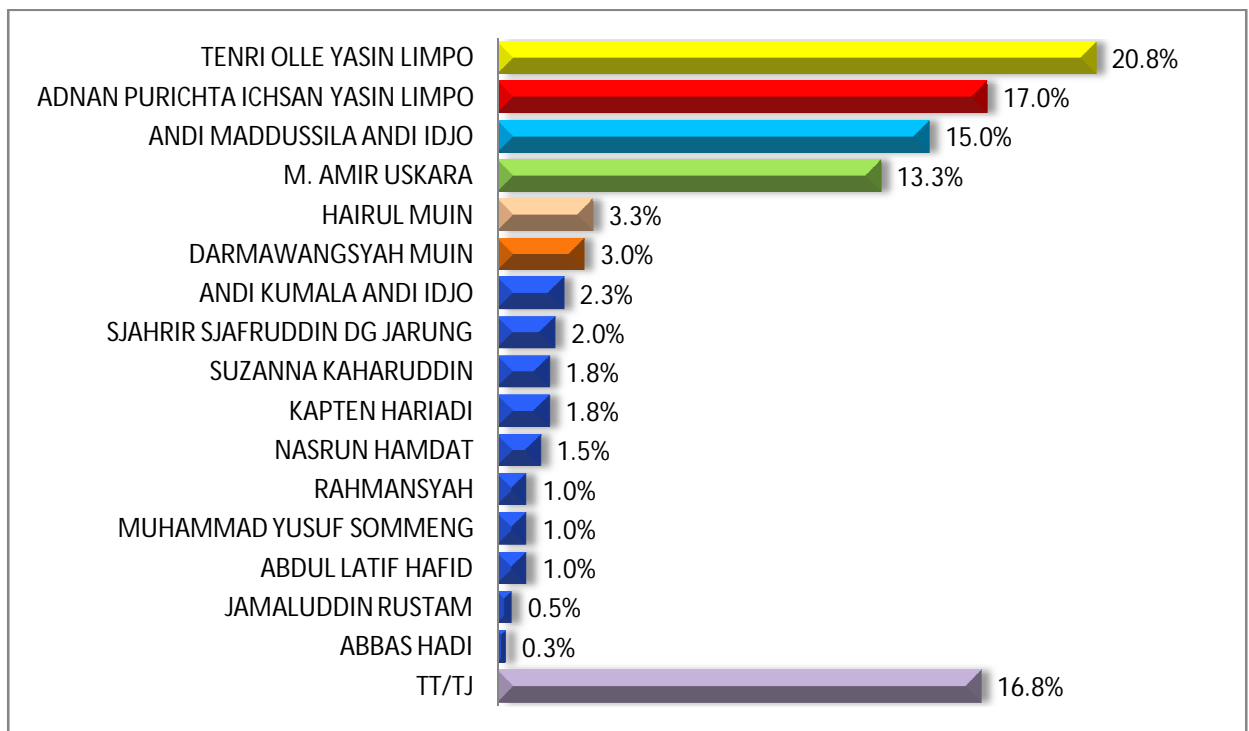
Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa peluang pemuda dalam Pilkada sangat besar, dan masih ada tantangan meskipun tidak signifikan. Masuknya pemuda keranah politik praktis di Kabupaten Gowa mendapat respon yang cukup baik dari berbagai kekuatan politik yang ada, baik itu Partai Politik, masyarakat adat, organisasi kepemudaan, maupun aktor politik itu sendiri. Dukungan partai politik dalam Pilkada dapat dilihat pada Pilkada Gowa 2015 lalu, dimana Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo mendapat dukungan dari 4 Partai Politik, sekalipun Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo maju melalui jalur independen. Keempat partai tersebut ialah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Partai Gerindra, dan Partai Golkar (kubu Aburijal Bakri).

Dukungan dari berbagai kekuatan politik yang ada dalam kelompok kepentingan harus disambut baik oleh pemuda, sebab cenderung objektif, mengingat bahwa

kelompok kepentingan bukanlah organisasi yang menguasai pemerintah (Rahman, 2007). Respon masyarakat di level *grass root* sudah terlihat sejak awal, bahwa Adnan Purichta Ichsana Yasin Limpo memiliki peluang yang besar di Kabupaten Gowa. Hal tersebut terlihat dari hasil survei opini publik terkait Pilkada di Kabupaten Gowa yang dilakukan oleh lembaga survei Celebes Research Centre.

Diagram 1. Dukungan Masyarakat kepada Adnan Purichta Ichsana Yasin Limpo, Berdasarkan Survei Bulan September 2014



Sumber : Celebes Research Centre Tahun 2014

Satu tahun lebih sebelum Pilkada dilakukan, nama Adnan Purichta Ichsana Yasin Limpo memang sudah menempati urutan kedua dalam survei yang dilakukan oleh Celebes Research Centre. Selisih 3.8 % dengan Tenri Olle Yasin Limpo masih berada pada ambang batas *margin of error* (MoE: $\pm 5\%$). Artinya, seandainya Pilkada Gowa dilaksanakan pada saat itu, Adnan Purichta Ichsana Yasin Limpo sudah sangat berpeluang untuk menang.

Besarnya peluang Adnan Purichta Ichsana Yasin Limpo dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, Adnan Purichta Ichsana Yasin Limpo memiliki kemampuan “mengambil hati” masyarakat. Sebelum maju sebagai calon bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsana Yasin Limpo sudah menjadi anggota DPRD Sulsel selama dua periode. Adnan Purichta Ichsana Yasin Limpo dipilih bukan karena partai yang

mengusungnya, tetapi karena dia memang memiliki ketokohan. Setelah pindah partai, Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo tetap terpilih. Pada Tahun 2009, Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo terpilih sebagai Anggota DPRD Sulsel dari Partai Demokrat. Sedangkan pada Tahun 2014, Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo terpilih kembali sebagai Anggota DPRD Sulsel dari Partai Golkar.

Kedua, pengaruh kepuasan masyarakat terhadap kinerja ayahnya (Ichsan Yasin Limpo) selama memimpin Gowa dua periode tentu menjadi nilai tambah bagi Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo. Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Ichsan Yasin Limpo tergambar dalam hasil survei yang dilakukan oleh Celebes Research Center dan Jaringan Suara Indonesia. Hasil survey Celebes Research Center menunjukkan bahwa sebanyak 79.60% masyarakat merasa puas terhadap kinerja Ichsan Yasin Limpo. Bahkan, dalam survei Jaringan Suara Indonesia, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Ichsan Yasin Limpo mencapai 84.90 % (Restuti, 2016; 153).

Ditinjau dari teori partisipasi politik, seperti yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, salah satu partisipasi politik masyarakat adalah pemberian suara dalam pemilihan. Hal senada juga dikemukakan oleh Gabriel Almond dalam Mochtar Mas'ood dan Collin Mac Andrews, bahwa salah satu bentuk partisipasi politik yang konvensional adalah pemberian suara (Nurdin, 2012). Partisipasi masyarakat di Kabupaten Gowa dalam Pilkada tahun 2015 lalu hanya 66.79 %. Rendahnya partisipasi masyarakat tersebut bisa saja terjadi karena masyarakat merasa bahwa ikut pemilihan tidak dapat mempengaruhi hidup mereka, seperti yang dimaksud oleh Ramlan Surbakti dalam definisi partisipasi politik (Surbakti, 2007). Menurut Mas'ood & Collin (2006), faktor lain yang mungkin menjadi penyebab rendahnya partisipasi politik dalam Pilkada adalah rendahnya tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, dan keanggotaan dalam partai politik.

Seperti Yin dan Yang, politik juga memiliki dua sisi, hitam dan putih, baik dan buruk, menang dan kalah. Pemuda dalam politik praktis, dalam hal ini Pilkada Gowa, juga demikian. Ada peluang yang diberikan oleh stakeholder yang ada, namun ada juga tantangan yang datangnya juga tentu dari stakeholder itu sendiri. Hal tersebut pasti terjadi, sebab tidak ada yang sempurna atau mutlak kebenaran dan keberadaannya.

Secara umum tantangan yang dihadapi oleh pemuda dalam Pilkada ada beberapa, seperti yang tergambar dari hasil penelitian ini. Pertama, adalah keseriusan

dari elite politik dan lembaga negara dalam memberikan ruang. Peran yang diberikan kerap kali masih bersifat teknis, belum masuk pada ranah yang sifatnya strategis. Banyak pemuda yang berperan, dan banyak pula ruang yang diberikan, hanya saja belum pada ruang yang cukup penting atau strategis. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemuda agar bisa mengambil peran yang lebih besar, dan mengisi ruang yang lebih banyak dan substantif. Kedepan peran pemuda dalam politik praktis, khususnya Pilkada, bukan hanya persoalan kuantitas, namun juga kualitas.

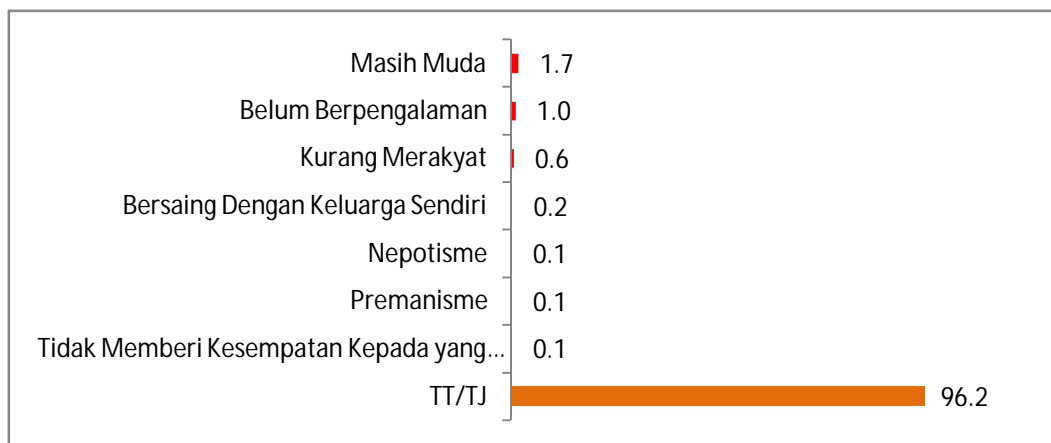
Kedua, modal finansial, yang terkadang belum dimiliki oleh pemuda. Tidak sedikit pemuda yang memiliki kapasitas dan keinginan, tetapi terhambat oleh *cost politic* yang cukup besar. Untuk mengikuti Pilkada dibutuhkan biaya politik yang tidak sedikit, mulai dari penyediaan atribut sosialisasi/kampanye, biaya operasional sosialisasi/kampanye, hingga biaya honor saksi pada saat pemilihan berlangsung. Belum lagi partai politik yang kebanyakan masih bersifat transaksional, dimana dukungan dan usungannya harus “dibeli” berdasarkan jumlah kursi yang dimiliki (DPR/D). Sekalipun ada jalur independen, tanpa menggunakan partai politik, namun untuk mengumpulkan KTP sesuai dengan yang disyaratkan, pastilah memerlukan biaya yang tidak sedikit pula.

Pemuda memang diharapkan harus terlebih dahulu mandiri secara ekonomi, bahkan harus sudah memiliki keuangan yang “berlebih”. Hal tersebut karena budaya pemilu di Indonesia belum mengenal istilah sumbangan masyarakat, dimana masyarakat memberikan donasi kepada kandidat yang mereka sukai, seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan beberapa negara maju lainnya. Biaya politik di Indonesia masih harus ditanggung oleh kandidat yang bertarung, atau didanai oleh pengusaha. Sementara itu, untuk mendapat bantuan dana dari pengusaha tidak sederhana. Pertimbangan pengusaha dalam mendukung calon kepala daerah sangat pragmatis. Selain hanya mau mendukung calon yang peluang menangnya paling besar, bantuan tersebut juga harus dikembalikan setelah menang dalam bentuk proyek pekerjaan.

Ketiga, persepsi masyarakat yang menganggap Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo masih terlalu muda. Faktor usia muda tergambar dalam survei yang dilakukan oleh Celebes Research Centre, pada bulan November tahun 2015. Selain faktor usia muda, ada juga faktor pengalaman, yang dipersepsi masih kurang dalam diri Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo.

Faktor usia muda tergambar dalam survei yang dilakukan oleh Celebes Research Centre, pada bulan November tahun 2015. Selain faktor usia muda, ada juga faktor pengalaman, yang biasanya memang cenderung saling terkait. Kekurangan atau hal negatif dari Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo yang dipersepsikan oleh masyarakat adalah masih muda, dan kurang berpengalaman. Meskipun persentase dari persepsi negatif tersebut sangat kecil, tapi tidak bisa dinafikan. Persoalan usia bisa menjadi sangat substansial jika tidak mampu dijelaskan dengan baik, karena berkaitan dengan kapasitas dan khususnya pengalaman. Selain itu, kecilnya persentase tersebut juga karena kultur masyarakat Indonesia belum biasa secara terbuka mengungkapkan kekurangan orang lain, sekalipun itu calon kepala daerah. Artinya, bisa jadi pada realitanya banyak masyarakat yang memiliki persepsi bahwa usia muda merupakan salah satu kekurangan utama dari Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo.

Diagram 2. Persepsi Negatif Masyarakat terhadap Adnan Purichta IYL



Sumber : Celebes Research Centre Tahun 2015

Keempat, persoalan keluarga, yang terdiri dari dua hal spesifik. Pertama adalah faktor ayahnya, Ichsan Yasin Limpo, yang merupakan aktor publik yang bisa saja mempengaruhi kebijakan yang ada untuk memenangkan Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo (Badjuri & Yuwono, 2007). Tidak sedikit masyarakat yang berpikir bahwa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo masih berada dibawah bayang-bayang ayahnya. Namun Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo mampu melepaskan diri dari bayang-bayang tersebut dengan mengunjungi seluruh desa/kelurahan dan dusun/lingkungan yang ada di Kabupaten Gowa untuk bersosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Frekuensi kunjungan yang sangat tinggi tersebut pada akhirnya menghapus stigma bahwa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo hanya memanfaatkan

apa yang dimiliki oleh ayahnya. Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo menyampaikan visi misi serta program-program yang akan dilaksanakan jika terpilih, dalam setiap kesempatan untuk meyakinkan masyarakat bahwa dia memang memiliki kapasitas dan rencana yang jelas terhadap pembangunan Gowa kedepan.

Masalah kedua dalam keluarga adalah persaingan sesama Limpo. Tenri Olle Yasin Limpo, yang merupakan kakak kandung dari ayahnya, juga maju sebagai calon bupati Gowa. Sebagai rumpun keluarga yang memiliki irisan basis pendukung, ini tentu menjadi tantangan berat (Restuti, 2016). Sebagai rumpun keluarga yang memiliki irisan basis pendukung, ini tentu menjadi tantangan berat. Akan tetapi, Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo kembali mampu menghadapi serta menyelesaikan tantangan tersebut, sehingga akhirnya terpilih menjadi Bupati Gowa. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh tradisi keluarga Yasin Limpo yang sudah terbiasa bersaing secara demokratis dalam setiap pertarungan politik.

Tantangan yang terakhir adalah kewajiban setiap pejabat publik untuk mundur dari jabatannya, ketika ingin maju menjadi calon kepala daerah. Belum genap satu tahun duduk sebagai anggota DPRD Sulsel pada periode 2014-2019, Adnan memutuskan untuk mundur dan mengabdikan kepada masyarakat Gowa. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo memiliki keberanian untuk bertaruh dalam Pilkada. Keberanian itu tentu tidak dimiliki oleh setiap politisi, baik itu di Kabupaten Gowa maupun di daerah lain.

Eksistensi pemuda dalam Pilkada ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama adalah faktor eksternal, yaitu ruang yang diberikan kepada pemuda. Sistem politik di Indonesia sudah memberi ruang bagi pemuda untuk ikut berperan dalam membangun bangsa, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dalam bidang politik praktis, khususnya Pilkada, sudah jelas diatur dalam regulasi yang ada. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah telah mengatur syarat untuk maju sebagai calon kepala daerah, dimana pemuda sudah bisa ikut. Syarat usia lebih jelas dicantumkan dalam Pasal 7 huruf (e), yaitu: "Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota".

Dengan adanya regulasi tersebut, maka pemuda sudah tidak memiliki hambatan untuk ikut Pilkada, dalam hal ini sebagai calon kepala daerah. Meskipun memang pemuda hanya bisa maju sebagai calon bupati/wakil bupati dan calon walikota/wakil walikota. Pemuda tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur/wakil gubernur, karena usia minimal adalah 30 tahun. Sementara Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan mencantumkan definisi pemuda pada Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1 angka 1 yakni “Pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun”. Regulasi tersebut tentu berlaku diseluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Gowa.

Selain regulasi yang jelas, partai politik juga telah memberikan ruang bagi pemuda untuk ikut dalam Pilkada. Hal tersebut terlihat jelas pada Pilkada Kabupaten Gowa tahun 2015. Meskipun Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo maju melalui jalur independen (perseorangan), ada empat partai politik yang tetap memberikan dukungan kepada pasangan Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo-Abdul Rauf Malagani. Keempat partai politik tersebut ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, dan Partai Golkar (kubu Aburizal Bakrie). Khusus untuk Partai Golkar, memang ada sedikit perbedaan pada Pilkada 2015 lalu, karena pada saat itu Partai Golkar masih terdiri dari dua kubu.

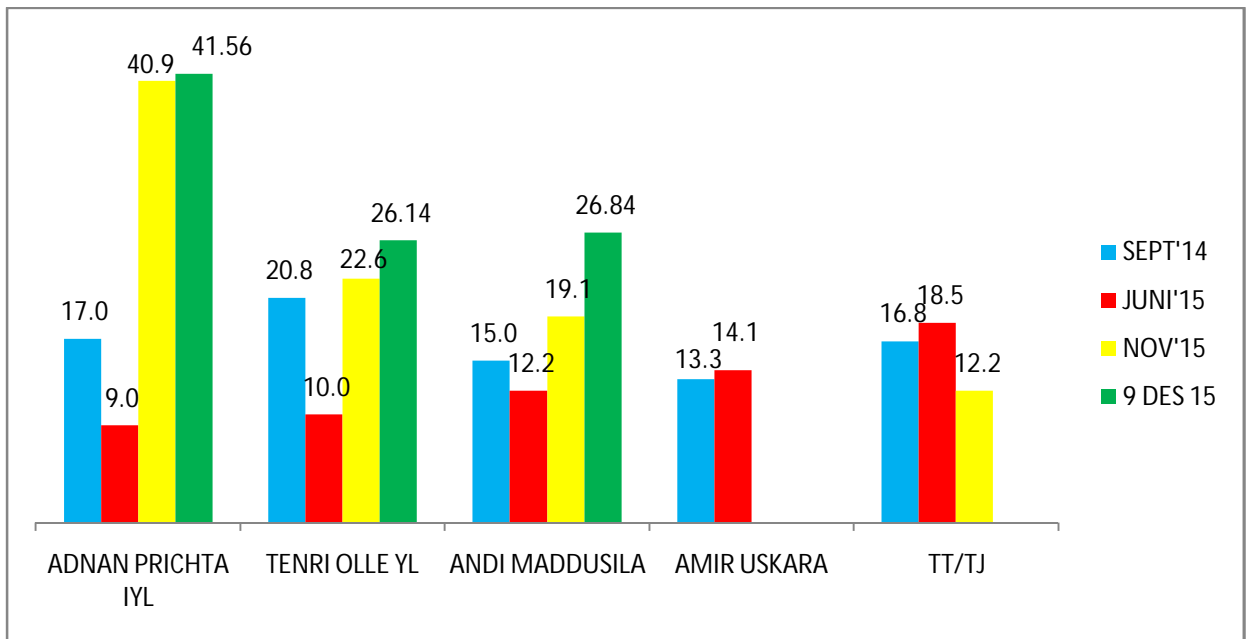
Faktor kedua dalam menentukan eksistensi pemuda dalam Pilkada adalah faktor internal, yakni kemauan dan kesiapan pemuda itu sendiri. Fenomena yang banyak terjadi adalah pemuda memiliki keinginan besar untuk maju sebagai calon kepala daerah, tetapi tidak memiliki kesiapan. Pemuda harus siap dalam mengikuti Pilkada, dimana indikatornya adalah kapasitas, pengalaman organisasi, dan kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat.

Pertama, pemuda harus memiliki kesadaran dan rasa bertanggungjawab terhadap masa depan bangsa dan Negara Indonesia. Setelah pemuda memiliki kesadaran, maka pemuda juga harus mempersiapkan diri untuk mengemban tanggungjawab tersebut. Pemuda harus menyadari bahwa akan terjadi regenerasi atau pergantian estafet kepemimpinan. Kedua, pemuda harus memiliki pengalaman yang memadai, baik itu dalam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, maupun organisasi sayap partai. Bahkan jika memungkinkan, pemuda juga sudah harus masuk ke partai

politik. Organisasi tidak hanya memberikan pengalaman, tetapi juga memperluas jaringan. Ketiga, pemuda harus memiliki modal finansial untuk bisa ikut bertarung dan menang dalam Pilkada. Harus disadari bahwa berpolitik itu butuh cost (biaya). Oleh karenanya pemuda harus sudah mapan secara ekonomi, sebelum maju sebagai calon kepala daerah. Meskipun diharapkan memiliki jaringan dengan pengusaha yang dapat memberikan support, kandidat harus terlebih dahulu memiliki modal pribadi, pengusaha hanya bersifat mendukung atau membantu. Keempat, pemuda harus kreatif dan inovatif. Dibutuhkan pendekatan yang baru dalam mendekati masyarakat, agar mau memilih pemimpin yang jujur dan memiliki kapasitas. Pendekatan yang baru juga dibutuhkan ketika sudah terpilih, untuk mengajak masyarakat dan semua stakeholder untuk membangun daerah secara bersama. Inovasi juga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan yang ada ditengah masyarakat. Sebab masalah yang dihadapi oleh masyarakat saat ini juga sudah semakin banyak dan beragam, sehingga tidak memungkinkan lagi diselesaikan dengan metode atau pendekatan lama atau tradisional. Kelima, pemuda harus memiliki integritas (kejujuran), ini merupakan syarat yang paling mendasar bagi seorang pemuda yang ingin maju menjadi kepala daerah. Tanpa integritas, maka daerah tidak akan maju, bahkan akan semakin memburuk, dan pada akhirnya Negara akan runtuh. Krisis kepemimpinan di Indonesia saat ini karena minimnya pemimpin yang berintegritas, sehingga banyak pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi serta pelanggaran hukum lainnya.

Kemampuan tersebutlah yang dimiliki oleh Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo, sehingga mampu meyakinkan masyarakat di Kabupaten Gowa. Elektabilitas yang tadinya masih dibawah 20%, mampu dinaikkan menjadi 40% menjelang pemilihan, dan akhirnya berhasil memenangkan Pilkada. Menurut Hidayat (2009), kemampuan tersebut mengartikulasikan hubungan antara kekuasaan dan kekuatan politik.

Diagram 3. Tren Elektabilitas Adnan Purichta Ichsyan Yasin Limpo beserta Rival terkuat dari masa ke masa, hingga hasil akhir Pilkada.



Sumber: Diolah dari hasil survei Celebes Research Centre dan Hasil Pilkada KPU Gowa Tahun 2014 dan 2015

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Peluang Adnan Purichta Ichsyan Yasin Limpo dalam Pilkada Gowa 2015 sangat besar. Semua elemen kekuatan politik yang ada memberikan dukungan, mulai dari partai politik, organisasi kepemudaan (dalam hal ini KNPI), masyarakat adat, dan masyarakat secara umum (yang tergambar dari hasil survei). Satu tahun sebelum Pilkada dilaksanakan, nama Adnan Purichta Ichsyan Yasin Limpo sudah berada pada urutan kedua dalam survey yang dilakukan oleh Celebes Research Center. Dalam survei tersebut, selisih dukungan antara Adnan Purichta IYL dengan Tenri Olle Yasin Limpo hanya 3.8 % (masih dalam ambang Margin of Error).

Tantangan yang dihadapi oleh Adnan Purichta Ichsyan Yasin Limpo adalah masalah usia muda, stigma anak bupati, persyaratan mundur dari jabatan politik, dan persaingan antar keluarga. Sebagian masyarakat masih melihat bahwa usia muda dari Adnan Purichta Ichsyan Yasin Limpo sebagai suatu kekurangan, yang tergambar dalam survey Celebes Research Center. Faktor usia muda dianggap sebagai kekurangan karena berpengaruh terhadap minimnya pengalaman, meskipun hal tersebut bukan sesuatu yang mutlak.

Eksistensi pemuda dalam Pilkada tergantung dari dua hal, yakni pemberian ruang dari kelompok elite “generasi tua”, dan kesiapan dan kemauan pemuda itu sendiri. Di Kabupaten Gowa, ruang bagi pemuda sangat terbuka lebar. Pemuda harus memiliki kapasitas pengetahuan, pengalaman organisasi dan kegiatan kemasyarakatan, serta kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat. Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, maka penulis memberikan dua saran untuk menjaga eksistensi pemuda dalam Pilkada. Pertama, semua stakeholder harus memberikan ruang bagi pemuda untuk ikut mengambil peran dengan sepenuh hati. Kedua, pemuda harus mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari segi kapasitas, integritas, maupun kemampuan finansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Badjuri A. & Yuwono T. (2007). *Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Budiarjo M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Hidayat I. (2009). *Teori-Teori Politik*. Malang: SETARA Press.
- Irawan P. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Kementerian Pemuda dan Olahraga. (2011). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan*. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Mas’oed M. & Colin A. (2006). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurdin R. (2012). Tesis: Pemuda dan Politik (Studi Tentang Partisipasi Politik Pemuda Menjadi Anggota Legislatif di DPRD Kota Makassar Periode 2009-2014). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Rahman H. (2007). *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Restuti H. (2016). *Pertarungan Antar Keluarga Pada Pilkada Gowa 2015: Suatu Studi Strategi Komunikasi Meraih Suara Pemilih*. Makassar: Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Surbakti R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia.